



PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INTERAKSI SPASIAL: STUDI EMPIRIS DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Sodik Dwi Purnomo¹ Yulina Tri Wahyuni² Krisnhoe Sukma Danuta³ Damar Jati⁴ Ady Achadi⁵

Abstract

Keywords:

Center for Economic Growth;
Spatial Interaction;
Scalogram Analysis;
Gravity Analysis.

In 2010 and 2020, South Sumatra Province had the third highest GDP on the island of Sumatra. However, based on the Williamson index, the level of income distribution that occurs between districts/cities is still low. This study aims to identify growth center area and spatial interactions of districts/cities in South Sumatra Province in 2010 and 2020. The analyses used in this research are scalogram analysis, centrality index and gravity analysis. The results showed that in 2010 there were 2 regencies/cities in Hierarchy I, 6 regencies/cities in Hierarchy II, 5 regencies/cities in Hierarchy III and 2 regencies/cities in Hierarchy IV. In 2020 there are 4 districts/cities in Hierarchy I, 4 districts/cities in Hierarchy II, 6 districts/cities in Hierarchy III and 1 district/city in Hierarchy IV. From 2010 to 2020, the interaction between growth center area and their hinterlands has increased. Banyuasin, Ogan Komering Ilir and Ogan Ilir districts are the areas that have the strongest interaction. The policy implication is that economic cooperation needs to be carried out between the growth center regions and the regions behind them so that economic growth can be assisted in each region.

Kata Kunci:

Pusat Pertumbuhan Ekonomi;
Interaksi Spasial;
Analisis Skalogram;
Analisis Gravitasi.

Abstrak

Pada tahun 2010 dan 2020 Provinsi Sumatera Selatan memiliki PDRB tertinggi ketiga di Pulau Sumatera. Namun, berdasarkan Indeks Williamson menunjukkan tingkat distribusi pendapatan yang terjadi antar wilayah kabupaten/kota masih rendah. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pusat-pusat pertumbuhan dan interaksi spasial wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010 dan 2020. Metode penelitian menggunakan analisis skalogram, indeks sentralitas dan analisis gravitasi. Hasil penelitian menunjukkan tahun 2010 terdapat 2 kabupaten/kota pada Hierarki I, 6 kabupaten/kota pada Hierarki II, 5 kabupaten/kota pada Hierarki III dan 2 kabupaten/kota pada Hierarki IV. Pada tahun 2020 terdapat 4 kabupaten/kota pada Hierarki I, 4 kabupaten/kota pada Hierarki II, 6 kabupaten/kota pada Hierarki III dan 1 kabupaten/kota pada Hierarki IV. Pada tahun 2010 ke 2020 interaksi antara pusat pertumbuhan dengan daerah *hinterland*nya mengalami kenaikan. Kabupaten Banyuasin, Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir merupakan daerah yang memiliki interaksi terkuat. Implikasi kebijakan perlu dilakukan kerjasama ekonomi antara daerah pusat pertumbuhan dengan daerah dibelakangnya agar pertumbuhan ekonomi dapat terbantu pada masing-masing daerah.

Koresponding:

Fakultas Ekonomika dan
Bisnis, Universitas
Wijayakusuma Purwokerto,
Jawa Tengah, Indonesia
Email:
sodikdwipurnomo@yahoo.com

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia⁵

Email: krisnhoe.sukma@gmail.com

Email: yulinatri0907@gmail.com

Email: damar.74t1@gmail.com

Email: adyachadi@unwiku.ac.id

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai proses yang dapat memberi dampak positif yaitu mampu meningkatkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat dalam jangka panjang. Pembangunan tidak hanya tentang pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga tentang keberadaan masyarakat yang lebih adil dan usaha peningkatan sumber daya manusia (Lahuddin, 2020). Pembangunan diawali dengan proses peningkatan pendapatan masyarakat dengan artian bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat terpenting bagi pembangunan. Pembangunan nasional dan pembangunan daerah memiliki keterkaitan peran yang sangat kuat antara satu sama lain. Keberhasilan pembangunan daerah terjadi karena adanya dorongan pembangunan nasional, sehingga menjadikan pembangunan daerah dapat berkembang (Nurlina & Ginting, 2018). Pembangunan daerah juga memiliki peran terhadap pembangunan ekonomi nasional yaitu sebagai faktor pendukung kedinamisan sistem perekonomian nasional (Purnomo, 2021).

Pembangunan ekonomi diharapkan dapat menumbuhkan daya tarik investasi secara alami meliputi pemenuhan ketersediaan sarana prasarana, transportasi, kelembagaan sosial, dan komunikasi (Nurlina & Ginting, 2018). Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi ekonomi suatu negara secara terus menerus menuju kondisi yang lebih baik selama periode waktu tertentu (Gulo, 2015). Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang diambil pemerintah dalam upaya keberhasilan pembangunan ekonomi adalah dengan melakukan pengembangan wilayah dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan wilayah suatu negara secara merata (Fudhail *et al.*, 2021).

Penetapan kawasan atau wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan dari kegiatan perekonomian dilakukan untuk merealisasikan kebijakan pengembangan wilayah (Nurlina & Ginting, 2018). Dampak dari pemetaan pusat-pusat pertumbuhan adalah harus dapat diimbangi dengan penyesuaian ke bawah dan dampak penyebaran melalui kegiatan ataupun aktivitas antara pusat-pusat pertumbuhan dengan basis sumber daya di kawasan/wilayah di persediaan. Dengan demikian, aktivitas atau kegiatan akan memiliki dampak yang signifikan pada kawasan-kawasan atau daerah-daerah di sekitarnya yang juga akan tumbuh dan berkembang. Dua atau lebih wilayah yang berdekatan, meskipun secara administratif terpisah, dikatakan saling menguntungkan dalam bentuk sinergi dan pertumbuhan interaktif. Pusat-pusat pertumbuhan yang didirikan di berbagai daerah juga diharapkan dapat memberikan efek menetes ke bawah (*trickle down effect*) ke daerah-daerah tertinggal daripada efek pengutuban yang dapat menyedot sumber daya dari daerah-daerah tertinggal.

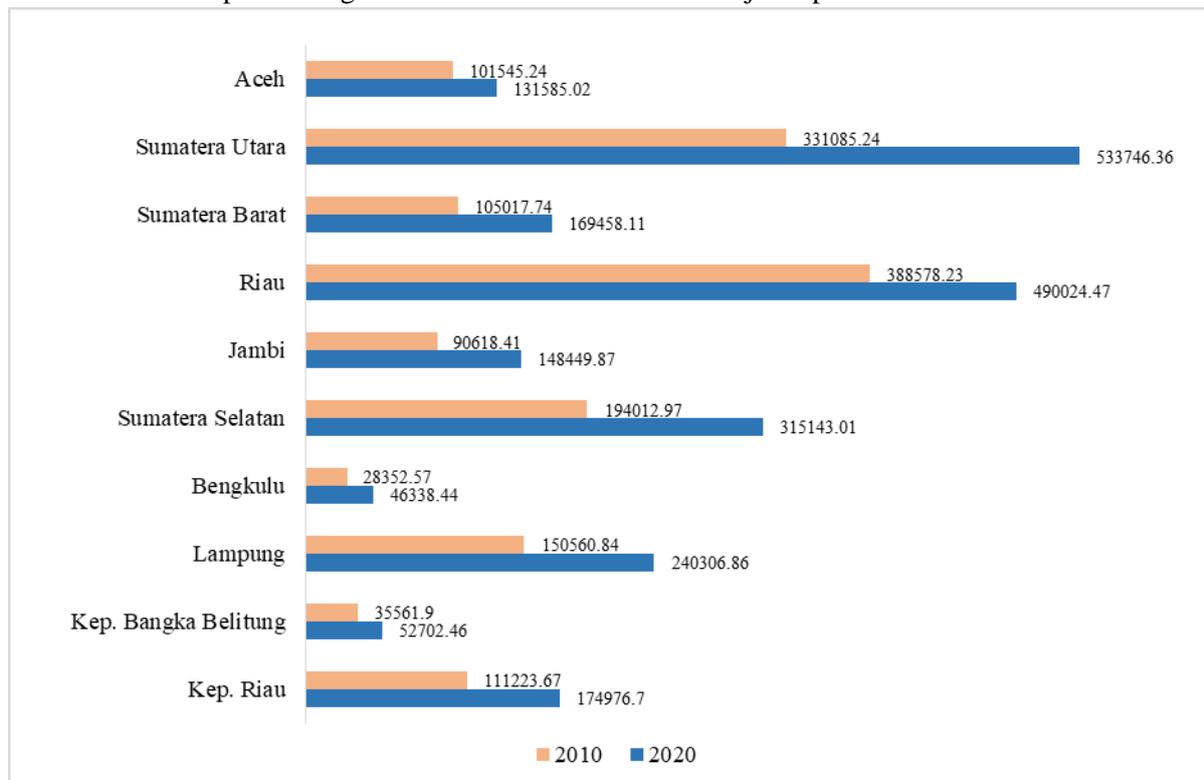
Pengembangan pusat pertumbuhan berfungsi untuk menggiatkan pola tata kawasan daerah dan pola interaksi antar daerah serta dapat mempererat sistem yang sudah dilakukan dalam upaya efisiensi pengembangan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah masing-masing (Diartho & Pratama, 2018). Keberhasilan suatu model pusat pertumbuhan dan pembangunan daerah dipengaruhi oleh interaksi antara pusat pertumbuhan dan wilayah sekitarnya. Interaksi spasial didefinisikan sebagai suatu hubungan berbalas yang saling mempengaruhi antar dua atau lebih suatu wilayah yang dapat menumbuhkan gejala, permasalahan baru, dan kenampakan akibat dari perhitungan lokasi atau wilayah dalam analisis ekonomi regional dan interaksi yang terjadi diantara keduanya mampu mempengaruhi kecepatan pembangunan wilayah yang bersangkutan (Emalia & Farida, 2018).

Pertumbuhan ekonomi yang pesat yang tidak diimbangi dengan pemerataan maka akan menimbulkan masalah ketimpangan wilayah (Soares *et al.*, 2017). Dampak dari ketimpangan tersebut adalah adanya daerah maju dan daerah tertinggal (Salmah *et al.*, 2020). Adanya daerah tertinggal diakibatkan oleh adanya pemusatan aktivitas ekonomi di sebuah wilayah, di mana ekonomi di daerah dengan tingginya kegiatan ekonomi yang difokuskan melaju dengan cepat (Abdullah *et al.*, 2021).

Ketimpangan pembangunan antar daerah terlihat pada kesenjangan kualitas sumber daya manusia, pendapatan per kapita, akses perbankan, dan ketersediaan sarana dan prasarana.

Ketimpangan wilayah ditandai dengan perbedaan tingkat perkembangan kegiatan ekonomi dan sosial penduduk (Panggarti *et al.*, 2022). Keterjangkauan masyarakat terhadap fasilitas menentukan tingkat pelayanan yang dapat diakses untuk menentukan kesejahteraan masyarakat (Soares *et al.*, 2017). Ketimpangan dalam pembangunan mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positif tersebut yaitu dapat mendorong daerah tertinggal untuk bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya untuk meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan dampak negatif dari ketimpangan yang tinggi yaitu terjadinya pemborosan ekonomi, melemahnya stabilitas dan solidaritas sosial, serta tingginya ketimpangan secara umum yang dianggap tidak adil. Untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah yang tinggi pemerintah daerah dapat melakukan Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk berbagi sumberdaya dalam pembangunan. Menurut Pratikno & Ruhyanto (2004), terdapat sejumlah alasan yang kuat yang mendasari kerjasama antar daerah: *pertama*, peraturan dan pengendalian yang bersifat hierarkhis sudah tidak lagi ideal karena sudah tersebarinya kekuasaan kepada daerah-daerah otonom. *Kedua*, *opportunity* dan *threat* pemerintah daerah banyak yang bersifat lintas wilayah. *Ketiga*, kerjasama antar daerah mampu memperkuat daya saing daerah dengan daerah luar dan *keempat*, kerjasama antar daerah dapat mendorong daerah dalam memenuhi keterbatasan sumberdaya miliknya.

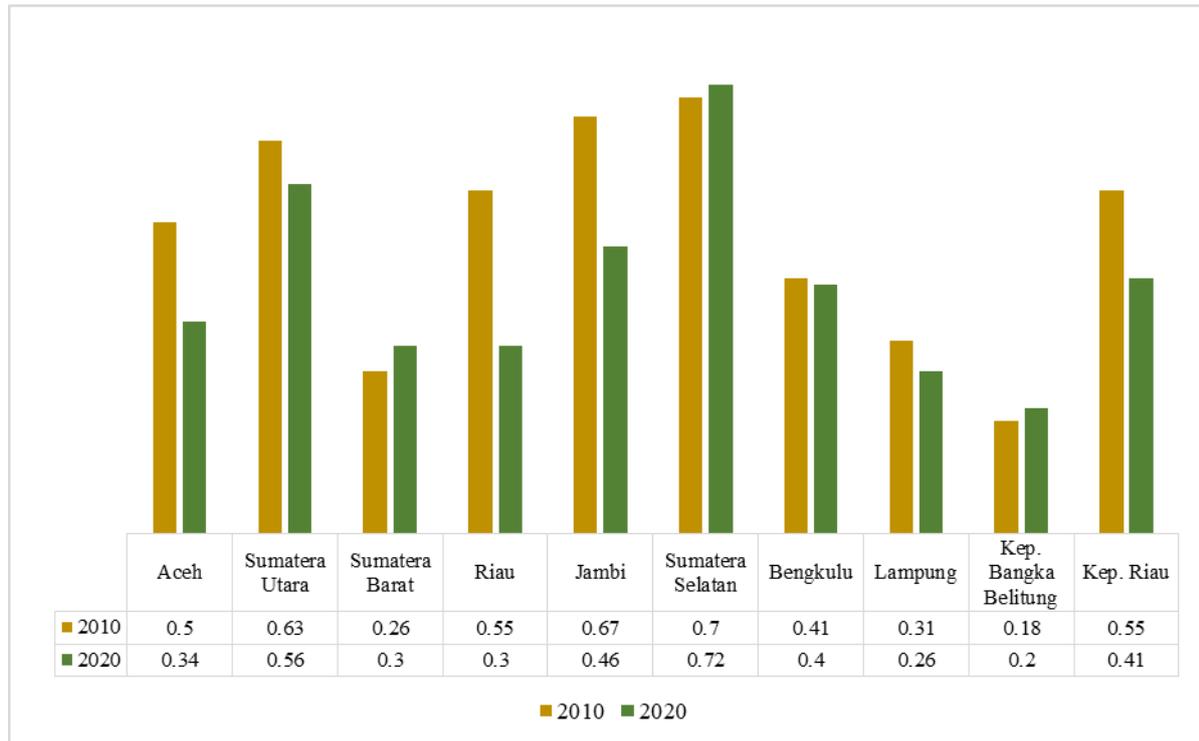
Indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan dapat dijadikan acuan di tingkat makro adalah pertumbuhan ekonomi yang tercermin melalui perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 Provinsi Sumatera Selatan memiliki perolehan PDRB yang tinggi diantara provinsi-provinsi lain di Pulau Sumatera. Secara lebih rinci perbandingan PDRB di Pulau Sumatera disajikan pada Gambar 1.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Gambar 1.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2010 Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2010 dan 2020 (Miliar Rupiah)

Pada tahun 2020 dan 2020 Provinsi Sumatera Selatan memiliki persamaan pada peringkat yang tinggi dengan menduduki peringkat ketiga penerimaan pendapatan daerah diantara provinsi di Pulau Sumatera. Hal tersebut mencerminkan bahwa tingginya jumlah nilai tambah bruto yang diberikan oleh sektor perekonomian daerah. Walaupun nilai PDRB nya cukup tinggi tetapi pemerataan pendapatan yang terjadi antar wilayahnya bisa dikatakan masih rendah jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Pulau Sumatera. Permasalahan ini ditunjukkan pada taraf ketimpangan pendapatan antar wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang sangat tinggi. Indeks Williamson digunakan untuk menunjukkan nilai ketimpangan pendapatan yang terjadi di antara wilayah atau daerah (Fudhail *et al.*, 2021). Gambar 2 memperlihatkan perbandingan nilai indeks Williamson provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2010 dan 2020.



Sumber : Badan Pusat Statistik, Data Diolah 2022

Gambar 2.
Perbandingan Indeks Williamson antar Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2010 dan 2020

Dilihat dari indeks Williamson tahun 2010 dan 2020 di atas, Provinsi Sumatera Selatan memiliki nilai ketimpangan tinggi dan mengalami kenaikan dengan selisih angka sebesar 0,02 mencerminkan nilai taraf rendah. Nilai tersebut memperlihatkan bahwa tingkat distribusi pendapatan yang terjadi antar wilayah kabupaten sangat rendah. Ketimpangan wilayah yang cukup besar memiliki nilai mendekati 1. Nilai ini menunjukkan distribusi pendapatan yang terjadi di antar daerah dalam konteks ini antar kabupaten/kota sangat rendah atau terjadi kesenjangan pendapatan antar daerah yang besar (Winarto *et al.*, 2021).

Hal yang melatarbelakangi studi ini yaitu pada tahun 2010 dan 2020 Provinsi Sumatera Selatan memiliki nilai PDRB yang cukup tinggi di antara kabupaten dan kota di Pulau Sumatera. Namun, merujuk pada nilai Indeks Williamson menunjukkan bahwa distribusi pendapatan yang terjadi antar wilayah kabupaten/kota masih tergolong sangat rendah. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi bagaimana perbandingan persebaran infrastruktur umum atau sarana dan prasarana umum di setiap kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2010 dan 2020. Dengan demikian, dapat di petakan kabupaten atau kota yang dapat dijadikan sebagai kawasan/daerah pusat

pertumbuhan. Selain itu, juga untuk mengetahui bagaimana interaksi daerah pusat pertumbuhan dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Pada penelitian ini peneliti memilih Provinsi Sumatera Selatan untuk dijadikan lokasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Provinsi Sumatera Selatan. Sampel pada penelitian ini adalah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dengan penggunaan data tahun 2010 dan 2020. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini didapatkan dari badan statistik ekonomi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi. Dokumentasi tersebut berasal dari dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun instansi terkait.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ialah fasilitas umum yang diukur dalam unit, jumlah penduduk diukur dengan jiwa, dan jarak antar kabupaten diukur dengan kilometer (km). Dalam studi empiris ini jumlah fasilitas yang digunakan sebagai obyek penelitian sebanyak 30 jenis fasilitas yang dinyatakan dalam ukuran unit. Jenis fasilitas tersebut meliputi (1) Taman Kanak-Kanak (TK), (2) Sekolah Dasar (SD)/sederajat, (3) Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat, (4) Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat, (5) Perguruan Tinggi (PT), (6) Sekolah Luar Biasa (SLB), (7) Rumah Sakit, (8) Rumah Bersalin, (9) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), (10) Puskesmas Pembantu, (11) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), (12) Pasar, (13) Restoran, (14) Swalayan/toserba, (15) Minimarket, (16) Toko/warung kelontong, (17) Industri, (18) Bank Umum, (19) Bank Swasta, (20) Bank Perkreditan Rakyat (BPR), (21) Koperasi Simpan Pinjam (Kospin), (22) Hotel, (23) Internet Kantor Desa, (24) Kantor Pos, (25) Polisis Sektor (Polsek), (26) Masjid (27) Gereja Kristen, (28) Gereja Katolik, (29) Pura, serta (30) Vihara.

Digunakan metode analisis skalogram yang dipakai dalam melihat dan mengetahui kemampuan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat di suatu kawasan. Metode skalogram ialah metode penelitian yang sangat sederhana yang bisa dipakai untuk melakukan sebuah analisis fungsi wilayah, dikarenakan pada metode skalogram hanya menerangkan daftar menurut bagian penduduknya. Skalogram adalah alat analisis yang dipakai untuk mengidentifikasi sentra pertumbuhan daerah atau pusat pertumbuhan wilayah menurut fasilitas yang dimiliki wilayah tertentu, dengan demikian dapat dipetakan hierarki dari pusat pertumbuhan ekonomi serta dan aktivitas pelayanan di suatu kawasan atau wilayah (Fudhail *et al.*, 2021). Tahap-tahap penyusunan analisis skalogram yaitu sebagai berikut:

- a. Mewujudkan urutan kota yang sesuai total penduduk dengan meletakkan di tempatkan kiri tabel.
- b. Mewujudkan urutan fasilitas yang telah diatur sesuai gelombang pada bagian atas.
- c. Memberikan gambar garis kolom dan sebuah baris hingga lembar kerja tersebut dapat membentuk sebuah matriks yang menjelaskan fasilitas yang terdapat di setiap wilayah kota.
- d. Menggunakan tanda (1) pada sel yang menyebutkan keberadaan sebuah fasilitas di daerah dan memakai tanda (0) pada sel yang dilihat tidak memiliki fasilitas.
- e. Mengurutkan ulang antara baris dan kolom sesuai frekuensi keberadaan fasilitas, semakin banyaknya fasilitas yang ada pada wilayah kota, semakin wilayah tersebut berada di urutan atas, semakin banyaknya wilayah yang memiliki fasilitas, maka jenis fasilitas tersebut diletakkan di kolom sebelah kiri.
- f. Mengalikan kolom-kolom yang tertata dengan nilai indeks sentralitas pada masing-masing wilayah kemudian dirancang ulang seperti pada cara kelima.

g. Langkah terakhir pada penyusunan analisis skalogram yaitu menandai sebuah peringkat atau hirarki kota untuk menentukan mana yang mampu diasosiasikan sesuai dengan sebuah nilai keberadaan fasilitas di sebuah wilayah. Semakin tinggi nilainya, maka akan semakin tinggi juga hirarki pada kota tersebut.

Langkah lanjutan dari analisis skalogram, yaitu indeks sentralitas (*Centrality Indeks Analysis*). Alat analisis ini digunakan untuk mengukur keberagaman jenis fasilitas yang ada di setiap kabupaten. Tidak hanya menganalisis sesuai total fungsi ataupun fasilitas pelayanan yang ada di sebuah wilayah, tetapi harus serasi juga dengan frekuensi keberadaan fungsi maupun fasilitas tersebut di wilayah yang diamati (Fudhail *et al.*, 2021). Frekuensi keberadaan fungsi memperlihatkan sebuah total fungsi serupa yang ada dan tersebar di daerah tertentu dengan rumus sebagai berikut (Mutaali, 2003):

$$C = (x/X)$$

Dimana: C = bobot atribut fungsi x; X = jumlah total fungsi dalam sistem; x = Nilai sentralitas gabungan = 100.

Kemudian digunakan analisis gravitasi untuk melihat dan mengetahui interaksi yang terjadi di wilayah atau kawasan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah-wilayah lainnya di sekitarnya. Variabel yang digunakan ialah total penduduk dan jarak antar kawasan atau wilayah. Melalui analisis gravitasi menghasilkan sebuah nilai interaksi yang menjelaskan bagaimana interaksi yang terjadi antar wilayah (Diartho & Pratama, 2018). Tahap model gravitasi dirumuskan sebagai berikut (Tarigan, 2006):

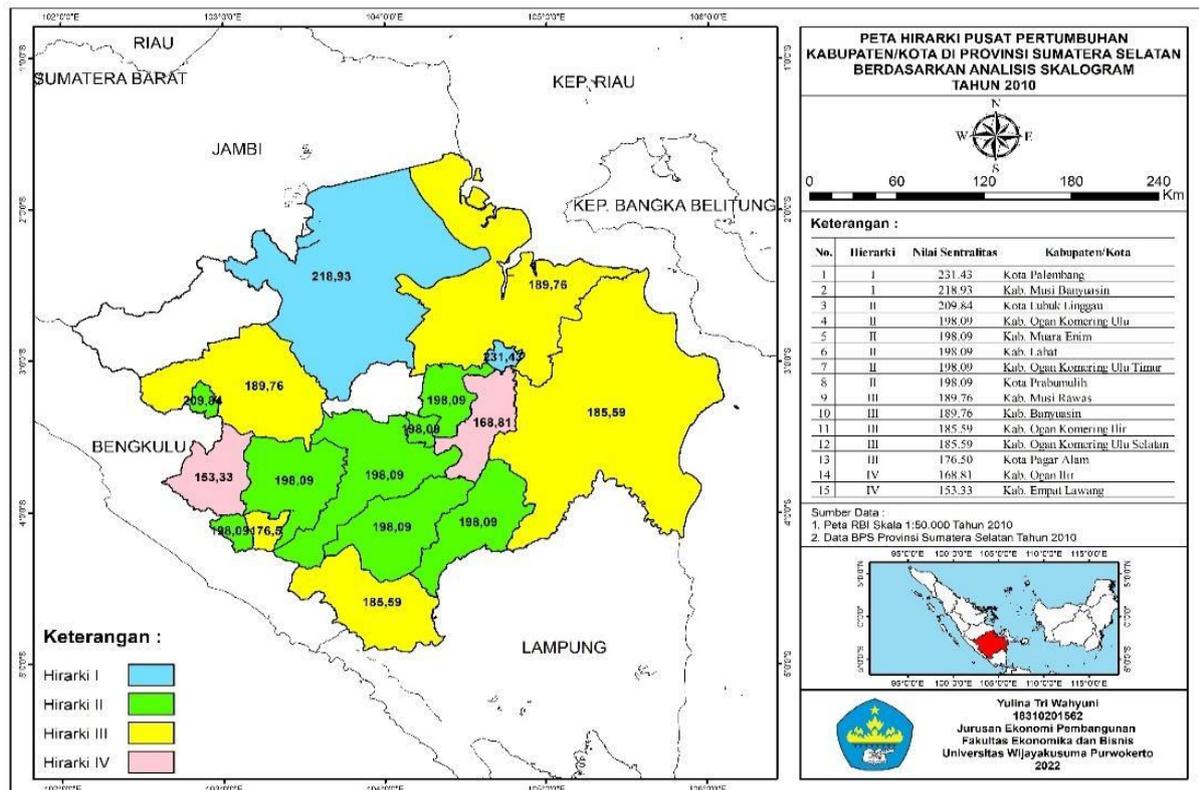
$$\text{Angka Interaksi } (A_{ij}) = k \frac{P_i \times P_j}{d_{ij}^2}$$

Dimana : k = konstanta rerata perjalanan per penduduk; P_i = penduduk kabupaten; P_j = penduduk kabupaten j; d_{ij} = jarak antara i serta j.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis skalogram dan indeks sentralitas digunakan untuk mengidentifikasi peran kabupaten berdasarkan kemampuannya melayani masyarakat. Jika suatu kabupaten memiliki sejumlah fasilitas yang relatif lengkap dibandingkan dengan kabupaten lain, maka dapat dikatakan bahwa kabupaten tersebut dapat berfungsi sebagai basis pertumbuhan wilayah tersebut. Dalam analisis ini mempertimbangkan fasilitas yang dimiliki wilayah sebagai indikator fungsinya sebagai basis pertumbuhan wilayah. Dalam penelitian ini, penyelesaian dihitung dengan menggunakan tingkat kelengkapan fasilitas kabupaten (Sutikno, 2007).

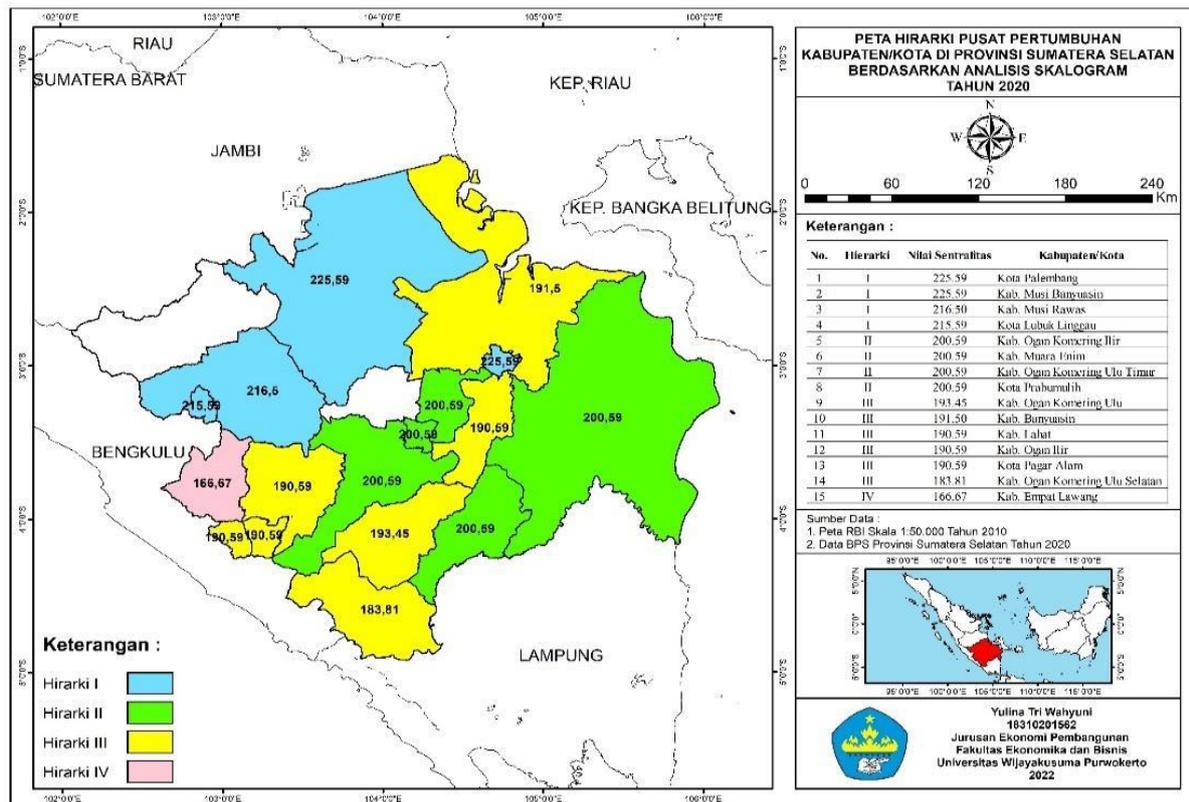
Jenis fasilitas yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 30 fasilitas yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD)/sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat, Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat, Perguruan Tinggi (PT), Sekolah Luar Biasa (SLB), Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Puskesmas Pembantu, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pasar, Restoran, Swalayan/toserba, Minimarket, Toko/warung kelontong, Industri, Bank Umum, Bank Swasta, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Koperasi Simpan Pinjam (Kospin), Hotel, Internet Kantor Desa, Kantor Pos, Polisi Sektor (Polsek), Masjid, Gereja Kristen, Gereja Katolik, Pura dan Vihara. Berdasarkan hasil analisis tersebut didapatkan hasil perhitungan pusat pertumbuhan, sehingga dapat digambarkan dalam peta. Hasil analisis skalogram di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2010 dan 2020 menunjukkan perubahan jumlah pusat pertumbuhan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Diolah 2022

Gambar 3.
Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010

Berdasarkan analisis skalogram dan indeks sentralitas, penentuan pusat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 diklasifikasikan menjadi 4 hierarki. Pada tahun 2010 hierarki I atau pusat pertumbuhan ekonomi terdapat 2 kabupaten/kota yaitu Kota Palembang dan Kabupaten Musi Banyuasin. Pertumbuhan ekonomi Kota Palembang dipengaruhi oleh adanya industri, perdagangan, layanan informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi serta akomodasi dan makan minum. Kemudian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin dipengaruhi oleh adanya industri, jasa keuangan dan asuransi serta jasa pendidikan. Untuk hierarki II terdapat 6 kabupaten/kota yaitu Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kota Prabumulih, kemudian untuk hierarki III terdapat 5 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kota Pagar Alam. Dan untuk hierarki IV terdapat 2 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Empat Lawang. Perlambatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ogan ilir dipengaruhi oleh kecilnya pengaruh sektor jasa keuangan dan asuransi, jasa pendidikan, jasa kesehatan serta informasi dan komunikasi. Kabupaten Empat Lawang dipengaruhi oleh kecilnya pengaruh sektor akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, jasa pendidikan dan jasa kesehatan. Selanjutnya hasil perhitungan pusat pertumbuhan ekonomi tersebut dibandingkan dengan tahun 2020 untuk mengetahui perubahan pusat pertumbuhan ekonominya. Berikut gambar 4 menunjukkan pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Diolah 2022

Gambar 4.
Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020

Berdasarkan analisis skalogram dan indeks sentralitas, penentuan pusat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 diklasifikasikan menjadi 4 hierarki. Pada tahun 2020 hierarki I atau pusat pertumbuhan ekonomi terdapat 4 kabupaten/kota yaitu Kota Palembang, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas dan Kota Lubuk Linggau. Pertumbuhan ekonomi Kota Palembang dipengaruhi oleh adanya industri, perdagangan, layanan informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, akomodasi dan makan minum dan jasa pendidikan. Kabupaten Musi Banyuasin dipengaruhi oleh adanya industri, perdagangan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi serta jasa pendidikan. Kabupaten Musi Rawas dipengaruhi oleh adanya industri, perdagangan, jasa keuangan dan asuransi, jasa pendidikan dan jasa kesehatan. Dan Kabupaten Lubuk Linggau dipengaruhi oleh adanya industri, perdagangan, akomodasi dan makan minum, jasa keuangan dan asuransi, jasa pendidikan dan jasa kesehatan. Untuk hierarki II terdapat 4 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kota Prabumulih. Kemudian untuk hierarki III terdapat 6 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Lahat, Kabupaten Ogan Ilir, Kota Pagar Alam dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Dan untuk hierarki IV hanya terdapat 1 kabupaten saja yaitu kabupaten Empat Lawang. Perlambatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Empat Lawang dipengaruhi oleh kecilnya pengaruh sektor akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, jasa pendidikan dan jasa kesehatan.

Apabila dibandingkan antara tahun 2010 dan 2020 pusat pertumbuhan di Provinsi Sumatera Selatan melalui analisis skalogram dan indeks sentralitas terdapat perbedaan. Daerah pusat pertumbuhan tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah daerah pusat pertumbuhan. Daerah pusat pertumbuhan tahun 2020 lebih banyak dibandingkan pada tahun 2010. Provinsi Sumatera Selatan dapat dikatakan dapat maju dan berkembang pada tahun 2020. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori

Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Interaksi Spasial: Studi Empiris di Provinsi Sumatera Selatan, Sodik Dwi Purnomo, Yulina Tri Wahyuni, Krisnhoe Sukma Danuta, Damar Jati, dan Ady Achadi

pusat pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Perroux yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di tiap daerah tidak terjadi di sembarang tempat, melainkan di lokasi tertentu yang memiliki perkembangan aktivitas ekonomi yang dinamis. Keberadaan pusat pertumbuhan dinantikan akan menimbulkan keterkaitan antar sektor. Daerah yang menjadi pusat pertumbuhan berada di dalam satu kawasan, Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wibisono & Kuncoro (2021), dimana daerah-daerah dalam hierarki yang sama mengelompok menjadi satu daerah dan memiliki ketersediaan fasilitas umum yang lebih lengkap dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Hal itu sejalan dengan dengan temuan (Fudhail *et al.*, 2021) yang menjelaskan bahwa daerah yang dijadikan pusat pertumbuhan memiliki fasilitas lebih lengkap/komplit dibandingkan daerah-daerah lainnya.

Interaksi wilayah (spasial) menunjukkan dinamika yang muncul di wilayah ini sebagai akibat dari aktivitas penduduknya, yang mengarah pada mobilitas tenaga kerja, migrasi, transfer informasi dan barang, pergerakan pelajar dan aktivitas ekonomi lainnya. Dalam penelitian ini analisis interaksi atau gravitasi digunakan untuk mengevaluasi kekuatan hubungan (kedekatan) antara dua area, mengingat area ini sebagai massa yang memiliki daya tarik menarik terhadap interaksi antara dua area (Abdullah *et al.*, 2021). Tabel 1 menunjukkan bahwa kabupaten/kota yang memiliki nilai interaksi terkuat dengan Kota Palembang adalah Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir, sedangkan nilai interaksi terkecilnya yaitu Kota Lubuk Linggau dan Kota Pagar Alam. Tabel 2 menjabarkan output perhitungan analisis gravitasi Kota Palembang dengan wilayah-wilayah kabupaten/kota yang berada di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020.

Tabel 1.
Hasil Analisis Gravitasi Wilayah Kota Palembang dengan Kabupaten/Kota Lainnya di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010

No.	Kabupaten/Kota	Nilai Interaksi (Interaksi/Tahun)
1	Kab. Banyuasin	23.226.023.005
2	Kab. Ogan Komering Ilir	13.928.140.195
3	Kab. Ogan Ilir	8.151.816.128
4	Kab. Muara Enim	8.085.016.403
5	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	6.776.313.320
6	Kab. Musi Banyuasin	5.204.336.586
7	Kota Prabumulih	3.741.789.261
8	Kab. Ogan Komering Ulu	3.320.968.336
9	Kab. Lahat	3.224.055.345
10	Kab. Musi Rawas	2.760.878.644
11	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	2.271.584.184
12	Kab. Empat Lawang	978.340.103
13	Kota Lubuk Linggau	856.609.098
14	Kota Pagar Alam	798.387.784

Sumber : Badan Pusat Statistik, Data diolah 2022

Tabel 2.
Hasil Analisis Gravitasi Wilayah Kota Palembang dengan Kabupaten/Kota Lainnya di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020

No.	Kabupaten/Kota	Nilai Interaksi (Interaksi/Tahun)
1	Kab. Banyuasin	29.716.643.725
2	Kab. Ogan Komering Ilir	16.893.748.304
3	Kab. Ogan Ilir	10.222.896.552
4	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	8.278.670.835
5	Kab. Muara Enim	7.928.968.521
6	Kab. Musi Banyuasin	6.613.804.068
7	Kota Prabumulih	5.117.694.575
8	Kab. Ogan Komering Ulu	4.320.236.136
9	Kab. Lahat	4.297.743.283
10	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	3.345.721.196
11	Kab. Musi Rawas	2.383.199.290
12	Kab. Empat Lawang	1.692.293.032
13	Kota Lubuk Linggau	1.142.653.394
14	Kota Pagar Alam	1.043.712.051

Sumber: Badan Pusat Statistik, Data diolah 2022

Berdasarkan perhitungan analisis skalogram dan indeks sentralitas Kota Palembang dijadikan sebagai pusat pertumbuhan di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan analisis gravitasi, daerah yang memiliki nilai interaksi terkuat dengan daerah pusat pertumbuhan Kota Palembang adalah Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir. Interaksi antar wilayah di Sumatera Selatan pada tahun 2020 secara keseluruhan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2010. Pertambahan jumlah penduduk dari tahun 2010 ke 2020 merupakan faktor kenaikan nilai interaksi daerah pusat pertumbuhan dengan daerah *hinterlandnya*. Ketimpangan pendapatan Sumatera Selatan tahun 2022 yang terjadi antar wilayah cukup tinggi yaitu sebesar 0,72 persen, akan tetapi pada ketimpangan pendapatan masyarakat menunjukkan pemerataan ketimpangan pendapatan penduduk dengan nilai sebesar 0,34 persen yang disebabkan adanya perpindahan penduduk untuk bekerja.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori interaksi spasial yang dikemukakan oleh Carey & Revenstein yang menjelaskan bahwa banyaknya jumlah migrasi masuk ke kawasan perkotaan sangat di pengaruhi oleh jarak tempat asal migran tersebut. Besarnya interaksi spasial dipengaruhi oleh arus gerak yang terjadi antara pusat-pusat pelayanan baik berupa barang, penduduk, uang maupun yang lainnya serta besarnya pergerakan orang antara titik awal (*starting point*) dan tujuan (*destination*). Faktor dari pemerataan ketimpangan pendapatan di wilayah asal adalah adanya perpindahan penduduk untuk bekerja. Hal ini sejalan dengan kajian empiris (Fudhail *et al.*, 2021) yang mengatakan bahwa pekerja migran akan berdampak pada ketimpangan pendapatan di wilayah asal akan menurun.

Dilihat lebih jauh, 2 daerah yang menjadi pusat pertumbuhan pada tahun 2010 memiliki efek penyebaran, sehingga mampu membuat wilayah di sekitarnya lebih berkembang dan membuat pusat pertumbuhan baru di tahun 2020. Pengamatan yang sama ditemukan oleh kajian empiris (Fudhail *et al.*, 2021), dimana *spillover effect* terjadi ketika kawasan di sekitar pusat pertumbuhan berkembang. (Fudhail *et al.*, 2021) berpendapat bahwa mobilitas atau perpindahan penduduk dihasilkan dari hubungan permintaan dan penawaran antar wilayah dalam bentuk ketersediaan barang/jasa. Daerah tujuan biasanya memiliki fasilitas yang sempurna dalam hal infrastruktur, pengetahuan dan sumber daya lainnya yang tidak ada di daerah asal. Mobilitas juga dipengaruhi oleh jarak, biaya perjalanan dan kemudahan akses.

Berdasarkan data Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, dijelaskan bahwa Sumatera Selatan merupakan provinsi yang dijadikan *pilot project* dari *Asian Development Bank mengenai Land Value Capture (LVC)* dengan pembangunan fasilitas, transportasi dan investasi publik. LVC tersebut ialah

usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas melalui regulasi dari suatu lahan dengan pendekatan peningkatan suatu lahan. apabila nilai suatu lahan sukses ditungkatkan, maka pemerintah akan membuat kebijakan agar dapat mendapatkan hasil dari tambahan nilai dari hasil lahan tersebut. Hasil dari kebijakan tersebut dimanfaatkan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur dan digunakan untuk mengatasi masalah implikasi negatif dari infrastruktur tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Mengacu pada hasil analisis data dan pembahasan maka dapat dirumuskan kesimpulan bahwa pusat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 dan 2020 diklasifikasikan menjadi 4 hierarki. Pada tahun 2010 hierarki I atau pusat pertumbuhan ekonomi terdapat 2 kabupaten/kota. Untuk hierarki II terdapat 6 kabupaten/kota. Kemudian hierarki III terdapat 5 kabupaten/kota. Dan hierarki IV terdapat 2 kabupaten/kota. Pada tahun 2020 hierarki I atau pusat pertumbuhan ekonomi terdapat 4 kabupaten/kota. Untuk hierarki II terdapat 4 kabupaten. Untuk hierarki III terdapat 6 kabupaten/kota dan hierarki IV hanya terdapat 1 kabupaten saja. Pusat pertumbuhan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020 terdapat perubahan yaitu berupa peningkatan jumlah daerah pusat pertumbuhan. Hasil analisis gravitasi daerah yang memiliki nilai interaksi tertinggi dengan daerah pusat pertumbuhan Kota Palembang adalah Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir. Interaksi antar wilayah di Sumatera Selatan pada tahun 2020 secara keseluruhan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2010 yang disebabkan oleh pertambahan jumlah penduduk dan migrasi penduduk untuk bekerja.

Temuan ini mengimplikasikan 1) perlunya dilakukan kerjasama ekonomi antara daerah pusat pertumbuhan dengan daerah yang lebih rendah pertumbuhannya agar pertumbuhan ekonomi dapat terbantu pada masing-masing daerah dan 2) perlunya pembangunan pola interaksi pelayanan dengan mengutamakan pengembangan sektor-sektor yang dinilai berdaya saing dan memiliki dampak positif bagi sektor-sektor pendukung agar dapat meningkatkan nilai interaksi daerah.

REFERENSI

- Abdullah, N., Syam, N., & Surur, F. (2021). Analisis Interaksi Keruangan dalam Mendukung Optimalisasi Pengembangan Potensi Wilayah Kepulauan. *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan*, 5(1), 55. <https://doi.org/10.24912/jmstkik.v5i1.7761>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. (2022). Provinsi Sumatera Selatan dalam Angka 2010-2020.
- Diartho, H. C., & Pratama, R. (2018). Analisis Fungsi Kecamatan sebagai Daerah Pusat Pertumbuhan dan Pelayanan Publik di Kabupaten Kediri (Pendekatan Interaksi Geospasial). *MediaTrend*, 13(2), 188–198. <https://doi.org/10.21107/mediatrend.v15i2.5286>.
- Emalia, Z., & Farida, I. (2018). Identifikasi Pusat Pertumbuhan dan Interaksi Spasial di Provinsi Lampung. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 19(1), 61–74. <https://doi.org/10.18196/jesp.19.1.4100>
- Fudhail, I., Sambodo, H., & Purnomo, S. D. (2021). Identifikasi Pusat Pertumbuhan dan Analisis Interaksi Spasial Perekonomian di Provinsi Jawa Timur. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 6(1), 43. <https://doi.org/10.33087/jmas.v6i1.217>
- Gulo, Y. (2015). Growth Center Identification and Its Supporting Area in Nias Regency Regional Development. *Widyariset*, 18(1), 37–48.
- Lahuddin. (2020). Analisis Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Wilayah (Studi Pada Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto dan Jombang). *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 1(1), 52–60.
- Mutaali, L. L. (2003). Studi Penentuan Desa-Desa Pusat Pertumbuhan di Provinsi DIY. *Majalah Geografi Indonesia*, 17(1): 33-51.
- Nurlina, N., & Ginting, A. R. B. (2018). Analisis Identifikasi Pusat-Pusat Pertumbuhan dan Wilayah Pendukungnya dalam Pengembangan Wilayah Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 60–69. <https://doi.org/10.33059/jseb.v9i1.462>
- Pangarti, U., Zumaeroh, Z., Purnomo, S. D., Retnowati, D., & Adhitya, B. (2022). Studi komparatif

- ketimpangan antar pulau di Indonesia. *In Forum Ekonomi*, 24(2), 288-298. <https://doi.org/10.30872/jfor.v24i2.10988>
- Pratikno, A., & Ruhyanto, A. (2004). *Mengelola Dinamika Politik dan Sumber Daya Daerah*. Yogyakarta: PLOD Departemen Dalam Negeri
- Purnomo, S. D. (2021). Analysis of Labor Absorption in Central Java Province. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 240-244. <http://dx.doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.311>
- Purnomo, S. D., Wijaya, M., & Setiawan, H. (2021). Infrastruktur dan Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Majalah Imiah Manajemen dan Bisnis*, 18(1), 10-19.
- Salmah, E., Sahri, S., & Astuti, E. (2020). Analisis Penentuan Pusat Pertumbuhan Baru di Kabupaten Lombok Barat. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 62-71. <https://doi.org/10.29303/e-jep.v2i1.21>
- Soares, L., Rustiadi, E., & Multasih, S. (2017). Analisis Disparitas dan Interaksi Spasial di Timor-Leste. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 1(1), 74. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2017.1.1.74-86>
- Sutikno, M. (2007). Analisis Potensi Daya Saing Kecamatan Sebagai Pusat Pertumbuhan Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Kabupaten Malang. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 1(1), 37942. <https://doi.org/10.21776/ub.jiae.2007.001.01.7>
- Tarigan, R. (2006). *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibisono, P., & Kuncoro, M. (2015). Efek Limpahan Perumbuhan Antar-Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2001-2013. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 16(1), 31-46. <https://doi.org/10.21002/jepi.v16i1.584>
- Winarto, H. (2021). Analisis Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Interaksi Spasial di Provinsi Jawa Tengah. *Majalah Imiah Manajemen dan Bisnis*, 18(2), 9-16.
- Chabrak, N., & Craig, R. (2013). Student Imaginings, Cognitive Dissonance and Critical Thinking. *Critical Perspectives on Accounting*, 24(2), 91-104. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2011.07.008>
- Cyan, M. R., Koumpias, A. M., & Martinez-vazquez, J. (2016). The determinants of tax morale in Pakistan. *Journal of Asian Economics*, 47, 23-34. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2016.09.002>
- Kusdewanti, A. I., Setiawan, A. R., Kamayanti, A., & Mulwarman, A. D. (2014). Akuntansi Bantengan: Perlawanan Akuntansi Indonesia Melalui Metafora Bantengan dan Topeng Malang. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(1), 149-169.
- Lehman, G. (2014). Moral Will, Accounting and the Phronemos. *Critical Perspectives on Accounting*, 25(3), 210-216. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2013.10.004>
- Mulwarman, A. D. (2007). Melampaui Pilihan Keberpihakan: Pada UMKM atau Ekonomi Rakyat. In *Seminar Regional Tinjauan Kritis Rancangan Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
- Triyuwono, I. (2003). Kearifan Lokal: Internalisasi "Sang Lain" dalam Dekonstruksi Pengukuran Kinerja Manajemen. In I. Triyuwono & A. E. Yustika (Eds.), *Emansipasi Nilai Lokal Ekonomi dan Bisnis Pascasentralisasi Pembangunan* (pp. 155-173). Malang: Bayumedia.
- Triyuwono, I. (2012). *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi dan Teori* (2nd ed.). Jakarta: Rajawali Pers.